

DAFTAR PUSTKA

- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa
- Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar. (2023). Profil dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Tanah Datar.
- Bintaro, T. (1996). Pembangunan dan Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Cahyani, L. E., Fatchuriza, M., & Rahmawati, M. P. (2023). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan)*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(2), 346–361.
- Calista, C. P., Putra, F. A. I., Maulita, F., Zahra, M., & Syakirah, N. A. (2025). Kesenjangan pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan: analisis kebijakan dan praktik di indonesia. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(03 Juni), 3965-3978.
- Dewi, L. K., Triono, B., & Dewi, D. S. K. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). J. Adm. Pemerintah. Desa, 1(1), 45-60.
- Hanasi, R. A., dkk. (2025). Analisis Kebijakan dan Implementasi Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampak Sosial-Ekonomi. Jurnal Pendidikan Tambusai.

Ekaputra, A. A., Febrianti, A., Muntaha, A. Y., Trianita, D., & Susanti, P. (2025).

Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 11-20.

Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan

Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Sasi*, 26(3), 380-391.

INDONESIA, P. P. R. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahun 2020.

Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).

Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi kebijakan publik: Pengertian, model-model dan penerapannya. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73.

Makmur, S. (2023). *Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan*. Lentera: Multidisciplinary Studies, 1(3).

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Nitisastro, W. (1993). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1969). Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2016). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Batusangkar: Pemkab Tanah Datar.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029. Batusangkar: Bappeda Kabupaten Tanah Datar.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025*. Batusangkar: Bappeda Kabupaten Tanah Datar.
- Perdana, M. A. C., Sihombing, T. M., Chrisinta, D., Sahala, J., & Budaya, I. (2023). Pengaruh dukungan pemerintah, infrastruktur, dan akses pasar terhadap pertumbuhan usaha kewirausahaan di wilayah perkotaan. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 149-161.
- Pratama, R., & Widodo, J. (2021). Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pramono, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik di Era Desentralisasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Putri, N. C., & Putri, L. Y. (2020). Analisis pembiayaan non-anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur*, 6(2), 91-103.

Rizki, N. P. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang).

Saputra, D., Sunarto, I., & Asmuni. (2024). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 214–225.

Siagian, S. P. (2010). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.

Syahrudin. (2021). *Seri implementasi kebijakan publik: Konsep dan teori implementasi kebijakan publik*. Nusamedia.

Tombakan, S. S. N., Runtuwene, Y., Mokoagow, S. K., Tatengkeng, T. H., & Wales, T. S. (2026). Implementasi kebijakan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 2849–2852.

Wadjdi, F. (2020). Efektivitas Pelayanan Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Komunitas Masyarakat Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis)*, 1(1), 17-26.

Wolah, F. T., Rompas, W. Y., & Ruru, J. M. (2025). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Sulun-Lelema di Kabupaten Minahasa Selatan*.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial.

Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(3), 1506–1515.

